

**AKIBAT HUKUM DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**Satria Manda Adi Marwan
NIM. 135010100111090**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN	Error!
Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
RINGKASAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
SUMMARY	Error!
Bookmark not defined.	
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	Error!
Bookmark not defined.	
B.Rumusan Masalah	Error!
Bookmark not defined.	
C.Tujuan Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
D.Manfaat Penulisan	Error!
Bookmark not defined.	
E.Sistematika Penulisan	Error!
Bookmark not defined.	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.Tinjauan Umum tentang Akibat Hukum	Error!
Bookmark not defined.	
B.Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	Error!
Bookmark not defined.	
a. Perlindungan Konsumen	Error!
Bookmark not defined.	
b. Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan	Error!
Bookmark not defined.	
C.Tinjauan Umum tentang Perbankan	Error!
Bookmark not defined.	
a. Konsumen Perbankan.....	Error!
Bookmark not defined.	

b. Rahasia Perbankan**Error!**
Bookmark not defined.

D.Tinjauan Umum tentang Pajak**Error!**
Bookmark not defined.

E.Tinjauan Umum tentang Perppu**Error!**
Bookmark not defined.

BAB III METODE PENELITIAN

A.Jenis Penelitian**Error!**
Bookmark not defined.

B.Pendekatan Penelitian.....**Error!**
Bookmark not defined.

C.Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....**Error!**
Bookmark not defined.

D.Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....**Error!**
Bookmark not defined.

E.Analisis Bahan Hukum**Error!**
Bookmark not defined.

F.Definisi Konseptual**Error!**
Bookmark not defined.

BAB IV PEMBAHASAN

A.Akibat Hukum Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Perbankan**Error!**
Bookmark not defined.

1. Pengaturan Rahasia Bank di Indonesia**Error!**
Bookmark not defined.

1.1. Sejarah Rahasia Perbankan**Error!**
Bookmark not defined.

1.2. Rahasia Bank di Indonesia.....**Error!**
Bookmark not defined.

1.3. Analisa Rahasia Bank dan Perlindungan Konsumen.....**Error!**
Bookmark not defined.

2. Analisa Kewenangan Otoritas Moneter dan Fiskal**Error!**
Bookmark not defined.

2.1. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal**Error!**
Bookmark not defined.

3. Akibat Hukum dikeluarkannya Perppu Nomor 1 tahun 2017**Error!**
Bookmark not defined.

3.1. Berlakunya Asas Lex Posteriori Derogat Legi Inferiori**Error!**
Bookmark not defined.

3.2. Dampak Terhadap Perbankan dan Perekonomian Indonesia.....**Error!**
Bookmark not defined.

3.2.1. Tidak Terjaminnya Rahasia Nasabah**Error!**
Bookmark not defined.

3.2.2. Nasabah Menarik Dana Dari Bank**Error!**
Bookmark not defined.

3.2.3. Terjadinya Inflasi.....**Error!**
Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP

A.KESIMPULAN**Error!**
Bookmark not defined.

B.SARAN.....**Error!**
Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA.....Error!
Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“AKIBAT HUKUM DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN TERHADAP PERBANKAN”**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan berhasil tersusun. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH.,LLM. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Reka Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Reka Dewantara, SH., MH.selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu hukum, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh Staf Pengajaran Program Studi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu kelancaran proses administrasi.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materiil kepada penulis dalam menempuh studi S1 IlmuHukum di Universitas Brawijaya.
8. Muhamad Hakim Sidqie, SH yang telah menjadi inspirasi dalam penulisan Skripsi ini
9. Layyin Nafisa yang telah bersedia menemani dan menjadi partner yang baik dalam berdiskusi
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Cabang Malang
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini kurang dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang diberikan sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak di sengaja.

Malang, Maret 2018

Penulis

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM DITERBITKANNYA
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI
KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN**

Identitas Penulis

a. Nama : **Satria Manda Adi Marwan**
b. NIM : **135010100111090**

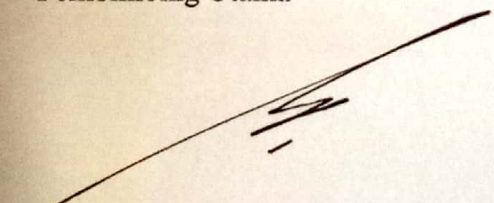
Konsentrasi : **Hukum Perdata Bisnis**

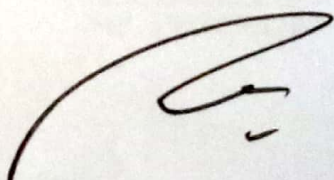
Jangka waktu Penulisan : **5 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

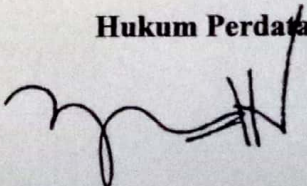

Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S
NIP. 195301211979031002


Dr. Reka Dewantara S.H.,M.H
NIP. 198305022008121003

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM
NIP. 197206222005011002

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN**

Oleh:

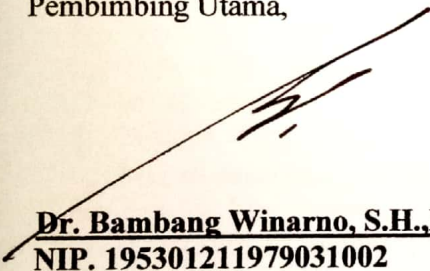
SATRIA MANDA ADI MARWAN

NIM. 135010100111090

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal: 04 APR 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S
NIP. 195301211979031002


Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H
NIP. 198305022008121003

Ketua Bagian Hukum Perdata

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Budi Santoso, SH., LLM
NIP. 19720622 200501 1 002


Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM DITERBITKANNYA
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI
KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN

Identitas Penulis

a. Nama : Satria Manda Adi Marwan
b. NIM : 135010100111090

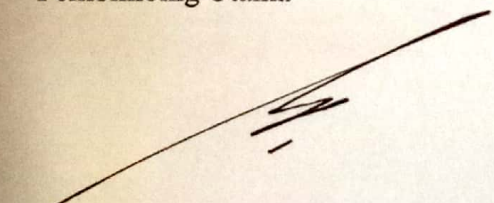
Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka waktu Penulisan : 5 Bulan

Disetujui pada tanggal :

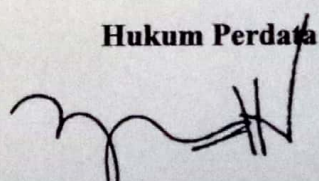
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S
NIP. 195301211979031002


Dr. Reka Dewantara S.H.,M.H
NIP. 198305022008121003

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata


Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM
NIP. 197206222005011002

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN**

Oleh:

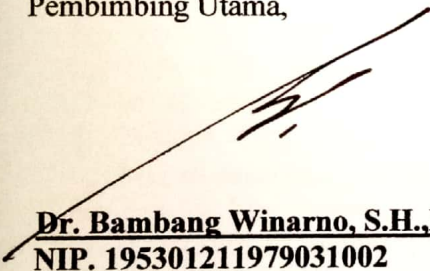
SATRIA MANDA ADI MARWAN

NIM. 135010100111090

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal: 04 APR 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S
NIP. 195301211979031002


Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H
NIP. 198305022008121003

Ketua Bagian Hukum Perdata

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Budi Santoso, SH., LLM
NIP. 19720622 200501 1 002


Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001



**AKIBAT HUKUM DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**

oleh :*Satria Manda Adi Marwan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam Perppu ini terdapat suatu pengaturan baru mengenai bagaimana direktorat jenderal pajak dapat mengakses data nasabah untuk kepentingan perpajakan. Terdapat perbedaan pengaturan antara Perppu ini dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Perbedaan mendasar dapat dilihat dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa Dirjen Pajak dapat memiliki akses ke data informasi nasabah, akan tetapi harus terlebih dahulu meminta wewenang ke Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan akan meminta kepada Bank Indonesia untuk memberikan perintah kepada bank terkait untuk memberika akses data kepada pejabat Kantor Pajak yang meminta data nasabah. Pengaturan yang sama juga dapat dilihat dalam Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 yang menjelaskan bahwsannya dalam kondisi tertentu Dirjen pajak dapat mengakses data nasabah untuk kepentingan perpajakan, akan tetapi harus terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari pimpinan Bank Indonesia. Sedangkan dalam Perppu No 1 tahun 2017, Dirjen Pajak memiliki akses secara langsung atau dapat dikatakan memiliki wewenang penuh dalam mengakses data rekening nasabah tanpa terlebih dahulu melakukan prosedur seperti yang diatur dalam Undang-undang Perbankan.

Adanya perbedaan pengaturan tersebut yang kemudian menjadi suatu isu hukum yang layak untuk dilakukan sebuah penelitian. Dalam pembahasan akan dijelaskan mengenai akibat hukum yang terjadi pasca diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan; juga termasuk didalamnya sub bab mengenai batas kewenangan fiskal dan moneter serta bagaimana bentuk koordinasinya; juga dampak yang ditimbulkan perppu ini terhadap perekonomian di Indonesia.

Kata kunci : *Rahasia Perbankan, Perpajakan, Akibat Hukum, Perppu.*

**LEGAL CONSEQUENT OF PUBLISHING GOVERNMENT REGULATION
SUBSTITUTE OF THE LAWS (PERPPU) NUMBER 1, 2017 ON THE ACCESS OF
FINANCIAL INFORMATION FOR THE TAXATION**

by: Satria Manda Adi Marwan, Faculty of Law, Universitas Brawijaya

ABSTRACT

This study discusses the legal consequences of the issuance of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 1 of 2017 on Access to Financial Information for Tax Interest. In this Perppu there is a new regulation on how the tax directorate general can access customer data for tax purposes. There is a difference in the arrangement between this Perppu and Law Number 10 Year 1998 concerning Banking and the Regulation of the Governor of Bank Indonesia Number: 2/19 / PBI / 2000 concerning Requirements and Procedures of Giving Or Order Written Unlocking Bank Secrets.

Fundamental differences can be seen in Article 41 of Law Number 10 of 1998 which explains that the Director General of Taxes may have access to customer information data, but must first request the authority to the Minister of Finance, then the Minister of Finance will request to Bank Indonesia to give orders to related banks to provide data access to Tax Office officials requesting customer data. The same arrangement can also be seen in the Regulation of the Governor of Bank Indonesia Number: 2/19 / PBI / 2000 which explains that in certain circumstances the DGT can access customer data for tax purposes, but must first obtain written order or permission to open Bank Secrets from the leadership of Bank Indonesia. Whereas in Perppu No. 1 of 2017, the Director General of Taxes has direct access or can be said to have full authority in accessing customer's account data without first performing procedures as regulated in the Banking Act.

The existence of these regulatory differences which later became a legal issue worthy of a study. In the discussion will be explained about the legal consequences that occurred after the issuance of Perppu No. 1 of 2017 on Access to Financial Information for Tax Interest; also includes a sub-chapter on the limits of fiscal and monetary authority and how the form of coordination; as well as the impact this Perppu has on the economy in Indonesia.

Keywords: Banking Secrets, Taxation, Legal Effects, Perppu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**AKIBAT HUKUM DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN TERHADAP PERBANKAN**”

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan berhasil tersusun. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH.,LLM. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Reka Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Reka Dewantara, SH., MH.selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu hukum, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh Staf Pengajaran Program Studi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu kelancaran proses administrasi.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materiil kepada penulis dalam menempuh studi S1 IlmuHukum di Universitas Brawijaya.
8. Muhamad Hakim Sidqie, SH yang telah menjadi inspirasi dalam penulisan Skripsi ini
9. Layyin Nafisa yang telah bersedia menemani dan menjadi partner yang baik dalam berdiskusi
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Cabang Malang
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini kurang dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang diberikan sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak di sengaja.

Malang, Maret 2018

Penulis